

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992, Perbankan adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada kedua undang-undang tersebut, definisi bank itu sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

2.2 Fungsi Bank

Berdasarkan definisi bank diatas, maka dapat diketahui fungsi bank sebagai salah satu *financial intermediary institution*, yaitu suatu institusi yang menghubungkan antara pihak yang memiliki dana (unit surplus) dengan pihak yang membutuhkan dana tersebut (unit defisit). Hal ini sesuai dengan Pasal 3 dan 4 Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1992, yaitu fungsi Perbankan yang utama adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sedangkan tujuan bank adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2.3 Pengelompokan Bank di Indonesia

2.3.1 Berdasarkan Jenis

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa bank yang dikenal di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang atau dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

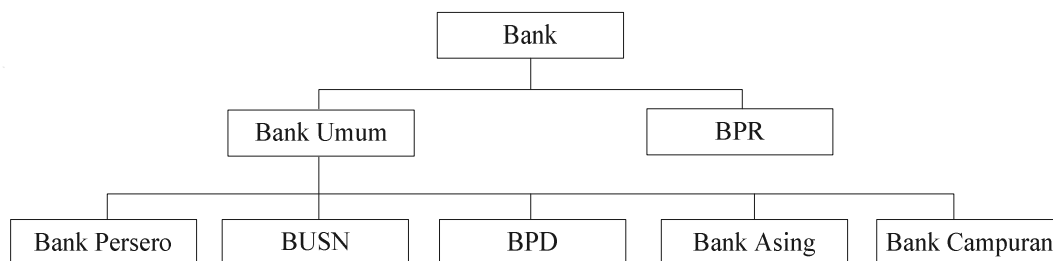
2.3.2 Berdasarkan Kepemilikan

Undang-undang nomor 10 tahun 1998, menyatakan bank di Indonesia berdasarkan kepemilikannya dibedakan atas:

- Bank BUMN merupakan bank milik pemerintah,
- Bank BUMD merupakan bank milik pemerintah daerah,
- Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) merupakan bank milik pihak swasta
- Bank Asing merupakan bank milik asing, dan
- Bank Campuran merupakan bank dengan kepemilikan yang berasal dari pihak dalam negeri dan asing.

Akan tetapi pada klasifikasi diatas terdapat kelemahan yaitu tidak dapat membedakan bank berdasarkan besarnya kepemilikan modal asing dalam bank swasta nasional.

Gambar 2-1 Pengelompokan Bank di Indonesia berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 1998



Sumber: Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998

2.4 Laporan Keuangan

Berdasarkan PBI No.3/22/PBI/2001 tanggal 31 Desember 2001, bank di Indonesia wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan, serta menyempurnakan ketentuan mengenai Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi, Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Pada penelitian ini akan digunakan Laporan Keuangan Bulanan Bank Umum dengan format yang sesuai PBI No.3/22/PBI/2001 tanggal 31 Desember 2001.

2.4.1 Neraca

Neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran mengenai posisi keuangan pada suatu waktu tertentu. Neraca menyajikan aktiva (*assets*) dan passiva (*liabilities and equities*) yang disusun berdasarkan tingkat kelancarannya. Dahlan Siamat (2005) menjelaskan aktiva sebagai berikut:

1. Kas. Kas merupakan alat likuid yang meliputi semua uang kas dalam bentuk rupiah maupun valuta asing (valas) milik bank termasuk kantornya di luar negeri.
2. Penempatan pada Bank Indonesia. Penempatan pada Bank Indonesia merupakan alat likuid yang meliputi saldo giro bank tersebut pada Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia dan *call money* pada Bank Indonesia atau Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) dan penempatan lainnya pada Bank Indonesia.
3. Giro pada bank lain. Giro pada bank lain meliputi saldo giro bank tersebut pada bank lain baik dalam rupiah maupun dalam valas.
4. Penempatan pada bank lain. Penempatan pada bank lain meliputi semua dana yang ditempatkan pada bank lain dalam bentuk *interbank call money*, tabungan, *deposit on call*, deposito berjangka, dan sertifikat deposito pada bank lain dalam bentuk rupiah dan valas.
5. Surat berharga yang dimiliki. Surat berharga meliputi semua surat berharga dalam rupiah atau valas yang dimiliki bank. Pembelian surat-surat berharga ini untuk tujuan cadangan sekunder serta mengoptimalkan keuntungan dengan memanfaatkan dana-dana ideal. Penanaman dana dalam surat-surat berharga tersebut meliputi Sertifikat Bank Indonesia (SBI), *Bankers Acceptance*, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan *Comercial Paper*.
6. Obligasi Pemerintah. Obligasi pemerintah meliputi semua obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah (Obligasi Negara).
7. Surat yang dibeli dengan janji dapat dijual kembali (*reverse repo*). Meliputi transaksi jual-beli surat berharga dimana bank berjanji menjual kembali surat berharga yang dibeli kepada penjual sesuai dengan jangka

waktu yang diperjanjikan (*reserve repo*). Transaksi ini dapat berupa rupiah maupun valas.

8. Tagihan derivatif. Meliputi transaksi berupa tagihan yang timbul dari transaksi derivatif.
9. Kredit yang diberikan. Kredit adalah penyediaan uang tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.
10. Tagihan akseptasi. Berasal dari tagihan akseptasi kepada pihak lain.
11. Penyertaan. Penyertaan modal adalah penanaman dana dalam bentuk saham secara langsung (*direct investment*) pada bank atau lembaga keuangan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dengan ketentuan:
 - Besarnya penyertaan modal tidak boleh lebih dari 15% dari modal lembaga keuangan tersebut
 - Jumlah seluruh penyertaan modal tidak melebihi 25% dari modal sendiri bank yang bersangkutan.
 - Sedangkan penyertaan modal pada perusahaan di luar lembaga keuangan hanya dapat dilakukan dalam rangka penyelamatan kredit.
12. Pendapatan yang masih akan diterima. Meliputi pendapatan bunga yang akan diterima.
13. Biaya dibayar di muka, uang muka pajak dan pajak tangguhan.
14. Aktiva tetap. Meliputi nilai tanah, gedung, dan inventaris yang dimiliki bank.

15. Aktiva sewa guna usaha. Meliputi aktiva yang diperoleh atas sewa guna usaha.
17. Agunan yang diambil alih. Meliputi agunan yang diambil alih oleh bank.
18. Aktiva lain-lain. Meliputi emas, mata uang emas, *goodwill*, dan lainnya.

Sisi kewajiban dan ekuitas pada neraca bank menggambarkan kegiatan penghimpunan dana yang berasal dari berbagai sumber. Dana tersebut berasal dari Bank Indonesia, masyarakat atau pihak ketiga dan modal bank itu sendiri. Dahlan Siamat (2005) menjelaskan passiva sebagai berikut:

1. Giro. Merupakan simpanan yang dapat digunakan sebagai alat bayar dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, serana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.
2. Kewajiban segera lainnya. Meliputi kewajiban kepada pemerintah yang belum dipindah-bukukan, bunga simpanan berjangka yang telah jatuh tempo, dan transfer.
3. Tabungan. Merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek dan bilyet giro. Tabungan meliputi tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu dan tabungan berjangka.
4. Deposito berjangka. Merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.
5. Sertifikat deposito. Merupakan simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah-tangankan.

6. Simpanan dari bank lain. Meliputi kewajiban ke bank lain dalam bentuk giro, *interbank call money*, tabungan, *deposit on call*, deposito berjangka, dan sertifikat deposito.
7. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*Repo*). Meliputi transaksi jual-beli surat berharga dimana bank berjanji membeli kembali surat berharga yang dijualnya tersebut dari pembeli sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan (*reverse repo*).
8. Kewajiban derivatif. Meliputi semua transaksi derivatif yang mengakibatkan timbulnya kewajiban.
9. Kewajiban akseptasi. Kewajiban akseptasi berisi kewajiban yang timbul dari akseptasi Bank.
10. Surat berharga yang diterbitkan. Meliputi semua kewajiban yang antara lain berasal dari penerbitan surat berharga oleh bank.
11. Pinjaman yang diterima. Kewajiban ini dapat berupa kewajiban kepada Bank Indonesia dan pihak lain.
12. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi. Berisi penyisihan penghapusan untuk transaksi rekening administratif.
13. Kewajiban sewa guna usaha, beban yang masih harus dibayar, taksiran pajak penghasilan, kewajiban pajak tangguhan, dan kewajiban lainnya.
14. Pinjaman subordinasi. Berisi kewajiban bank kepada pihak terkait dengan bank dan pihak lain dalam rangka pinjaman subordinasi.
15. Modal pinjaman. Berisi kewajiban bank kepada pihak terkait dengan bank dan pihak lain berupa modal pinjaman.

16. Hak minoritas. Merupakan nilai kepemilikan bank pada perusahaan lain.
17. Ekuitas. Merupakan modal sendiri yang terdiri dari modal disetor, agio, modal sumbangan, selisih penjabaran laporan keuangan, selisih penilaian kembali aktiva tetap, dan laba ditahan.

2.4.2 Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menggambarkan jumlah pendapatan yang diterima bank dan beban yang dikeluarkan pada suatu waktu tertentu. Perhitungan laba rugi disusun dengan mengelompokkan pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non operasional.

2.4.2.1 Pendapatan dan Beban Operasional

Pendapatan dan beban yang dikelompokkan dari kegiatan operasional terdiri atas:

1. Pendapatan bunga. Merupakan pendapatan bank yang berasal dari hasil bunga dalam rupiah dan valas pada kegiatan operasionalnya. Selain itu, juga memasukan pendapatan berupa komisi dan provisi yang diterima dari pemberian kredit.
2. Beban bunga. Merupakan semua beban yang dibayarkan bank dalam bentuk bunga dalam rupiah dan valas. Pada beban bunga juga terdapat komisi dan provisi yang dibayarkan oleh bank dalam bentuk komisi dan provisi pinjaman.

3. Pendapatan operasional lainnya. Pendapatan ini meliputi pendapatan-pendapatan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan provisi, komisi, dan fee yaitu komisi/provisi dari transaksi derivatif dan *fee* dari kredit kelolaan.
 - b. Pendapatan transaksi valuta asing yaitu keuntungan transaksi valas/derivatif berupa *spot*, *forward*, *swap*, dan *option*. Pendapatan dan beban ini dilaporkan secara neto. Jika pendapatan transaksi valas lebih besar dari bebannya, maka selisihnya akan dilaporkan sebagai pendapatan transaksi valas. Sebaliknya, jika pendapatan transaksi valas lebih kecil dari bebannya, maka selisihnya akan dilaporkan sebagai beban transaksi valas.
 - c. Pendapatan nilai kenaikan surat berharga. Kenaikan ataupun penurunan nilai surat berharga dilaporkan secara neto.
4. Beban (pendapatan) penghapusan aktiva produktif. Merupakan penyusutan/amortisasi/penghapusan yang dilakukan bank terhadap aktiva produktif bank seperti kredit yang diberikan, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan transaksi derivatif, penyertaan, dan lainnya.
5. Beban estimasi kerugian komitmen dan kontijensi. Berisi penyusutan amortisasi/penghapusan atas transaksi rekening administratif.
6. Beban operasional lainnya. Berisi semua pengeluaran bank pada kegiatan operasionalnya seperti beban administrasi dan umum, beban personalia, beban penurunan nilai surat berharga, beban transaksi valas, dan lainnya.

2.4.2.2 Pendapatan dan Beban Non Operasional

Pendapatan dan beban yang dikelompokkan dari kegiatan non operasional terdiri atas:

1. Pendapatan non operasional. Berisi pendapatan yang diterima bank dari aktivitas non operasional seperti sewa, keuntungan penjualan aktiva tetap dan inventaris, selisih kurs, dan lainnya.
2. Beban non operasional. Meliputi kerugian penjualan/kehilangan aktiva tetap dan inventaris seperti denda atau sanksi, selisih kurs, dan lainnya.

2.4.3 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas untuk jangka waktu tertentu. Laporan arus kas berdasarkan PSAK No.2 terdapat dua buah metode, yaitu:

- a. Metode langsung

Dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan; atau

- b. Metode tidak langsung

Dengan metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan (*deferral*) atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

2.4.4 Laporan Komitmen dan Kontinjensi

Komitmen dan kontinjensi merupakan kegiatan usaha bank yang bersifat administratif yang terdiri dari tagihan dan kewajiban komitmen serta tagihan dan kewajiban kontinjensi. Tagihan komitmen itu sendiri berisi fasilitas pinjaman yang diterima bank dalam rupiah maupun valas yang belum digunakan. Sedangkan kewajiban komitmen terdiri dari fasilitas kredit kepada nasabah dalam rupiah dan valas yang belum ditarik dan *irrevocable* L/C yang masih berjalan dalam pelaksanaan impor dan ekspor.

Tagihan kontinjensi berisi tagihan berupa garansi yang diterima, pendapatan bunga dalam penyelesaian, dan lainnya dalam rupiah dan valas. Sedangkan kewajiban kontinjensi berisi kewajiban berupa garansi yang diberikan atau yang dikeluarkan oleh bank, *revocable* L/C yang masih berjalan untuk kegiatan impor dan ekspor, dan lainnya dalam rupiah dan valas.

2.5 Definisi Profitabilitas

Robert S. Pyndick (1998) menyatakan bahwa setiap perusahaan komersial secara rasional akan menjalankan kegiatan ekonominya dengan memiliki tujuan utama berupa memaksimalkan profit. Profit itu sendiri merupakan selisih antara pendapatan total dikurangkan biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sedangkan profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan suatu profit.

$$\text{Profit} = \text{Total Revenue} - \text{Total Cost} \quad (2.1)$$

Terdapat beberapa pengukuran untuk menghitung profitabilitas suatu perusahaan. Dahlan Siamat (2005) menyatakan dalam mengukur profitabilitas dapat digunakan analisa Du-pont, yang merupakan prosedur pengukuran

profitabilitas bank dengan menggunakan rasio *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE). Stauton, Guru dan Balanchandar (2000) mengungkapkan pemilihan rasio yang digunakan sangat ditentukan oleh tujuan pengukuran profitabilitas. Selain ROE dan ROA dapat pula digunakan *net interest margin* (NIM). Selain itu, Demircuc-Kunt dan Huizinga (2000) menggunakan pendekatan *Return on Equity* (ROE). Penggunaan ROE ini dikarenakan tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan kesejahteraan pemegang sahamnya (*stockholder's wealth*). Sehingga dengan menggunakan ROE akan tercermin *Stockholder's wealth* dari perusahaan yang bersangkutan.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Net Profit}}{\text{Equity}} \quad (2.2)$$

2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank

Menurut Stauton, Guru dan Balanchandar (2000), faktor-faktor yang menentukan profitabilitas bank dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. *Internal factors* merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh manajemen bank yang merefleksikan kebijakan dan keputusan manajemen bank dalam penghimpunan dan penggunaan dana, modal (*capital*), manajemen likuiditas dan manajemen biaya (*expense management*). Sedangkan *external factors* merupakan faktor di luar kontrol manajemen bank yang mencakup faktor lingkungan seperti kondisi makro ekonomi dan industri perbankan. Pada penelitian ini faktor eksternal yang akan digunakan adalah suku bunga SBI dan inflasi.

2.6.1 Faktor Internal

2.6.1.1 Permodalan Bank

Modal bank sekurang-kurangnya memiliki empat fungsi utama, yaitu fungsi operasional, fungsi perlindungan, fungsi pengamanan dan fungsi pengaturan. Menurut Dahlan Siamat (2001) keseluruhan fungsi modal bank tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. memberikan perlindungan kepada nasabah
- b. mencegah terjadinya kejatuhan bank (*bank failures*)
- c. memenuhi kebutuhan gedung kantor dan inventaris
- d. memenuhi ketentuan permodalan minimum
- e. meningkatkan kepercayaan masyarakat
- f. menutupi kerugian aktiva produktif bank
- g. sebagai indikator kekayaan Bank
- h. meningkatkan efisiensi operasional bank
- i. untuk menutup risiko operasional yang dapat terjadi.

Penggunaan modal bank digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan kegiatan operasional bank. Jumlah modal bank dianggap tidak mencukupi jika bank tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum

atau yang biasanya disebut *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang harus selalu dipertahankan oleh bank. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), yaitu kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan ketetapan Bank Indonesia (2004) besaran CAR minimum yang harus dimiliki oleh bank adalah sebesar 8%.

Menurut Stauton, Guru dan Balachandar (2000) menyatakan bahwa bank yang memiliki rasio modal tinggi akan relatif lebih aman dalam menghadapi kerugian. Tetapi tingginya rasio modal terhadap aset diasumsikan sebagai indikator rendahnya leverage, risiko dan profitabilitas. Sebaliknya, Demirguc Kunt-Huizunga (1998) dan Abreau (2000) menyatakan terdapat pengaruh positif antara rasio modal dengan tingkat profitabilitas bank. Bank dengan permodalan yang kuat memiliki pendanaan yang besar untuk kegiatan operasional maka akan memiliki kesempatan berinvestasi yang lebih besar dan memperoleh profitabilitas yang lebih besar.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yaitu kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia. KPMM didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administrasi sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontinjen dan atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga.

Risiko dalam arti luas dapat timbul baik dalam bentuk risiko kredit maupun risiko yang terjadi karena fluktuasi harga surat-surat berharga, dan tingkat bunga serta nilai tukar valuta asing. Jadi secara teknis, KPMM diukur dari persentase tertentu terhadap ATMR. Dimana modal yang dimaksud meliputi modal inti dan modal pelengkap. Modal inti biasanya terdiri atas modal yang

disetor oleh pemegang saham, cadangan atau sebagian laba yang tidak dibagi dan laba ditahan (*retained earnings*). Sedangkan modal pelengkap adalah cadangan revaluasi aktiva tetap, penyisihan penghapusan aktiva produktif, modal pinjaman, dan pinjaman subordinasi.

Dalam menghitung ATMR, terhadap masing-masing aktiva diberi bobot risiko yang besarnya berdasarkan pada tingkat risiko pada aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang didasarkan pada golongan nasabah, peminjam serta sifat agunan.

2.6.1.2 Manajemen Dana Bank

Manajemen dana bank merupakan upaya yang dilakukan bank dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas penerimaan dana untuk disalurkan kepada aktivitas pembiayaan.

2.6.1.2.1 Sumber-sumber Dana Bank

Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan menghimpun dana masyarakat oleh bank tersebut. Untuk melihat sumber dana bank dapat dilihat pada sisi pasiva dari neraca bank yang berupa kewajiban bank (*liabilities*). Kewajiban bank tersebut adalah modal inti (*core capital*), giro, deposito berjangka, tabungan, *deposito on call* (merupakan simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan lebih dahulu sesuai kesepakatan pihak bank dan nasabah), sertifikat deposito (merupakan deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperjual belikan), pinjaman antar bank, obligasi (merupakan bukti utang dari emiten yang dijamin dengan agunan berupa harta kekayaan milik emiten dan atau pihak ketiga yang menanggung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo), *repurchase agreement*, dan sumber dana lainnya.

Bank Indonesia selaku bank sentral menetapkan bahwa setiap bank di Indonesia memiliki saldo Giro Wajib Minimum (GWM). Giro Wajib Minimum ini adalah kewajiban bank dalam memiliki likuiditas minimal 5% dari total dana pihak ketiga yang harus disimpan dalam bentuk di Bank Indonesia.

Demirguc Kunt-Huizunga (1998) berpendapat bahwa terdapat pengaruh negatif antara penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka dengan tingkat profitabilitas bank. Hal ini disebabkan karena dalam memperoleh dana tersebut bank harus menyertakan imbalan kepada nasabahnya, dalam bentuk bunga. Untuk mengukur seberapa besar proporsi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka terhadap total aset bank, kita dapat menggunakan rasio *customer and short term funding to total asset*. Sebaliknya Abreu (2000) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara penghimpunan dana dari masyarakat dengan profitabilitas. Semakin besar dana yang dihimpun dari masyarakat maka bank dapat menggunakan dana tersebut untuk memberikan pembiayaan.

2.6.1.2.2 Penggunaan Dana Bank

Mengingat fungsi bank sebagai intermedias, maka bank wajib menyalurkan dana yang telah dihimpunnya untuk aktivitas pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana agar sesuai dengan tujuan alokasi dana. Adapun tujuan dari alokasi dana adalah:

1. mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan risiko yang rendah
2. mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Dahlan Siamat (2001) menjelaskan penggunaan dana bank dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:

1. *Earning Assets* (aktiva produktif).

Aktiva produktif adalah semua penanaman dana dalam rupiah dan valuta asing yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Pengelolaan dana pada aktiva produktif digunakan sebagai sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan operasional bank, termasuk biaya bunga, tenaga kerja dan operasional lainnya. Penggunaan dana untuk *earning asset* terdiri atas kredit, penempatan pada bank lain (dapat berupa *call money*, deposito berjangka, *deposit on call*, dan sertifikat deposito), surat-surat berharga (Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, *Bankers Acceptance*, Surat Berharga Pasar Uang atau SBPU, dan *Comercial Paper*), dan penyertaan modal.

2. *Non Earning Asset* (Aktiva tidak produktif)

Aktiva tidak produktif merupakan penanaman dana ke dalam aktiva yang tidak memberikan hasil bagi bank. Aset bank yang tergolong dalam aktiva tidak produktif terdiri atas:

- Alat likuid (*cash asset*). Alat likuid adalah aktiva yang dapat digunakan setiap saat untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Yang termasuk dalam aktiva likuid adalah kas, giro pada bank sentral, dan giro pada bank-bank lain.
- Aktiva tetap dan inventaris. Dalam membiayai aktiva tetap dan inventaris, bank hanya boleh menggunakan maksimal 50% dari total modalnya untuk membiayai seluruh kebutuhan aktiva tetap dan inventarisnya. Dalam perhitungan penyediaan modal minimum bank (CAR) penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris

dimasukkan sebagai Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dengan bobot risiko 100%. Hal ini menunjukkan bahwa penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris dananya harus dibiayai dari modal sendiri bank yang bersangkutan.

Demirguc-kunt dan Huizunga (1999) dalam penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh positif antara rasio pembiayaan terhadap total aset bank (*loan to total aset*) dan tingkat profitabilitas. Pengaruh ini disebabkan karena dalam pembiayaan (loan) bank akan memperoleh pendapatan bunga. Pengaruh antara penggunaan dana dalam hal pembiayaan dengan profitabilitas bank sangat dipengaruhi oleh proses seleksi dan evaluasi pemberian pembiayaan.

2.6.1.3 Manajemen Likuiditas Bank

Likuiditas bank berkaitan dengan kemampuan suatu bank untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat. Selain itu dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo, dan memenuhi permintaan kredit dengan tepat waktu. Sebuah bank dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya.

Setiap hari dilakukan pengendalian likuiditas dalam bentuk penjagaan semua alat-alat milik bank yang dapat dipergunakan untuk memenuhi munculnya tagihan dari nasabah yang datang sewaktu-waktu, untuk menghindari dari masalah solvabilitas. Dalam menjalankan operasionalnya bank dapat mengalami kelebihan dan kekurangan likuiditas. Apabila terjadi kelebihan likuiditas, bank dapat menempatkan kelebihan likuiditas yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan, bila kekurangan likuiditas bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan likuiditas tersebut. Sarana yang dapat dipakai untuk

memenuhi kekurangan likuiditas adalah Giro Wajib Minimum di Bank Sentral, kliring dan pasar uang antar-bank.

Bank harus dapat memenuhi penarikan dana dari sumber dana yang dimiliki pemilik dana melalui giro, tabungan dan deposito. Selain itu, Bank harus dapat memenuhi permintaan dana melalui pembiayaan yang diberikan. Untuk menjaga kemungkinan tersebut bank harus memiliki aset yang likuid. Dalam neraca sisi aktiva biasanya aset bank yang likuid adalah aset yang tergolong aktiva tidak produktif (*unearning asset*). Aset-aset tersebut dapat berupa kas, giro pada bank sentral, dan giro pada bank-bank lain. Sebagaimana yang telah kita bahas, bahwa aktiva tidak produktif merupakan penanaman dana ke dalam aktiva yang tidak memberikan hasil bagi bank. Sehingga jika bank memiliki aset likuid yang besar, maka aspek profitabilitasnya yang akan terganggu. Sedangkan jika bank memiliki aset yang memberikan keuntungan yang tinggi biasanya aset tersebut merupakan aset yang kurang likuid. Hal ini jelas menunjukkan adanya pengaruh negatif antara profitabilitas dan likuiditas. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Demirguc Kunt-Huizunga (1998) dan Hasan (2000). Selain itu Hasan (2000) menggunakan rasio *unearning asset* terhadap total aset untuk melihat penggunaan dana yang dihimpun bank. Rasio ini digunakan sebagai proxy untuk manajemen likuiditas bank.

2.6.1.4 Manajemen Biaya Operasional Bank

Menurut Demirguc-kunt & Huizunga (1999) biaya operasional yang paling besar berasal dari biaya gaji pegawai. Rasio biaya *overhead* terhadap total aset digunakan untuk melihat sejauh mana biaya operasional sebuah bank. Rasio biaya *overhead* yang tinggi diperkirakan akan memberikan pengaruh negatif terhadap profitabilitas karena biasanya bank yang efisien melakukan kegiatan operasionalnya dengan biaya yang rendah. Selain itu penelitian Staunton, Guru

dan Balachandar (2000) menggunakan *total expenditure* terhadap total aset untuk melihat sejauh mana pengaruh manajemen biaya terhadap profitabilitas bank. Hasil penemuannya menyatakan bahwa rasio biaya operasional yang tinggi akan mengakibatkan menurunnya tingkat profitabilitas bank. Hal ini dikarenakan dengan tingginya biaya operasional terutama kenaikan biaya gaji mengindikasikan aktivitas bisnis bank yang semakin meningkat sehingga kompensasi yang diberikan bank kepada karyawan semakin besar.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Abreu (2000) yang menyatakan bahwa *overhead* berpengaruh positif dengan profitabilitas bank umum. *Overhead* yang tinggi menunjukkan tingginya kegiatan operasional bank, sehingga dapat dikatakan bahwa terjadinya peningkatan produktivitas bank yang kemudian meningkatkan pendapatan dan profitabilitas bank. Selain itu, bank telah membebankan biaya *overhead* kepada nasabah.

2.6.2 Faktor Eksternal

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asli Demirguc-Kunt dan Harry Huizinga (1999), penelitian ini juga melakukan analisa variabel makro ekonomi berupa suku bunga dan tingkat inflasi.

Suku bunga (*interest rate*) adalah beban biaya yang dinyatakan dengan persentase tertentu dalam rangka peminjaman uang untuk jangka waktu tertentu yang merupakan biaya kredit bank kepada nasabah. Demirguc-Kunt dan Huizinga (1999) menyatakan bahwa suku bunga memiliki pengaruh positif dengan interest margin dan profitabilitas bank. Pada penelitian ini akan digunakan suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia).

Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus dari suatu perekonomian. Sebagai salah satu indikator makro

ekonomi, inflasi memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi, daya saing, tingkat bunga dan distribusi pendapatan, dan juga berperan dalam mempengaruhi perputaran dana melalui lembaga keuangan formal.

Bank sebagai lembaga keuangan yang bersumber utama dana berasal dari masyarakat harus berusaha menarik minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank tersebut. Hal ini mengakibatkan bank harus memberikan *return* lebih besar dari tingkat inflasi. Biasanya sebuah bank dalam menentukan *cost of fund* sudah menyesuaikan dengan tingkat inflasi, berarti ketika tingkat inflasi tinggi maka *cost of fund* yang dikenakan kepada peminjam semakin besar. Maka, hal ini akan secara tidak langsung dapat berpengaruh positif terhadap pendapatan dan profitabilitas bank, hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Demircuc-Kunt dan Huizinga (1999). Sedangkan menurut Hanson dan Rocha (1986) menyatakan bahwa inflasi dapat meningkatkan pengeluaran bank pada biaya penggajian (*labor cost*), sehingga inflasi memiliki pengaruh negatif dengan profitabilitas bank umum.

Pada saat kondisi ekonomi memburuk, maka kemungkinan pembiayaan yang *default* akan semakin besar dan hal ini akan menurunkan tingkat profitabilitas bank. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Abreau (2000) yang menunjukkan adanya pengaruh negatif antara tingkat inflasi dengan profitabilitas bank.